

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Ahsin Thohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta, Elsam.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ind-Hill.Co.
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionay*, Ninth Edition.
- HAW. Widjaja, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Jazim Hamidi, 2008, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Made Suwandi, 2002, *Pokok-Pokok Pikiran Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia (Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien)*, Jakarta, Direktur Fasilitas Dan Pelaporan Otda, Ditjen Otda Departemen Dalam Negeri.
- Mohammad Mafhud MD., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu perundang-undangan dasar-dasar dan pembentukannya*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Kanisius.
- Y.Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta Grasindo.
- Ni'matul Huda Dan R. Nazriyah, 2011, *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung, Nusa Media.
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta, UII Press.
- _____ , 2005, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- _____ , 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, FH UII Press.

P.J. Suwarno, 1994, *Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974:Sebuah Tinjauan Historis*, Yogyakarta, Kanisius.

Soehino, 2002, *Hukum Tata Negara : Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, BPFE.

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Sri Soemantri M, 1981, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali.

Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah DIY.

Media Elektronik

www.indonesia-investments.com, *Ekonomi Indonesia*, diakses pada tanggal 1 Mei 2017 pukul 09.20 WIB.

<http://eprints.uns.ac.id/10495/1/148311608201010551.pdf> ,Rini Hadiyanti, *Penentuan Lokasi Jaringan Minimarket Di Kota Surakarta Dengan Berbasis Pada Network Location Model*, 2009, Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2017 Pukul 14.17 WIB.

Muhammad Waliyadin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Pemerintah*, [Http://Www.Legalitas.Org](http://www.legalitas.org), Diakses Tanggal 15 Mei 2017 Pukul 12.15 WIB.

Susiyati Bambang Hirawan, *Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia*, http://web.mac.com/adrianpanggabean/Loose_Notes_on_Indonesia/Decentralization_and_Local_Finance_files/Prof%20Susiyati%20Hirawan%20%28Pidato%20Pengukuhan%29.pdf diakses pada tanggal 18 Mei 2017 pukul 21.15 WIB.

[Http://Www. Wikipedia.Org](http://www.wikipedia.org), Pemerintahan Daerah Diakses Pada Tanggal 19 Mei 2017 Pukul 21.45 WIB.

Media Cetak

Bahan Acara Nomor 4 Tahun 2011 Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern.